



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
WALIKOTA SINGKAWANG**

**NOMOR 01/KB/XIX.PNK/07/2013**

**NOMOR 134.5/06/DPPKA**

**TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA  
PADA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN  
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Adi Sudibyo** : Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Awang Ishak** : Walikota Singkawang, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Firdaus Nomor 1, Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Singkawang Nomor : 363/NK/X – XIII.2/6/2011 Tanggal 16 Juni 2011  
134.5/015/DPPKA  
Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pada Pemerintah Kota Singkawang Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
2. Kepala BPK adalah Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
6. Data adalah data milik Pemerintah Daerah Kota Singkawang yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
7. Akses Data adalah suatu cara atau metode untuk melihat, mengirim, mengambil, dan menggunakan Data Pihak Pertama.
8. Sistem Informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi, dan prosedur yang digunakan untuk mengakses Data Pihak Kedua.

**Pasal 2**  
**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

*M.*

*1.*

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
11. Surat Keputusan BPK Nomor 12/SK/I-VIII.3/09/2005 tentang Pelimpahan Wewenang BPK RI kepada Kepala Perwakilan BPK RI untuk Menyerahkan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Nota Kesepahaman antara BPK dengan Pemerintah Kota Singkawang dan Nomor : 363/NK/X – XIII.2/6/2011  
134.5/015/DPPKA tanggal 16 Juni 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kota Singkawang Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

### **Pasal 3**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Mewujudkan hubungan kerjasama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

#### **Pasal 4**

##### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pihak Kedua, yang terdiri dari :
  - a. sistem aplikasi komputer;
  - b. infrastruktur jaringan komunikasi; dan
  - c. prosedur Akses Data.
- (2) Data Pihak Pertama yang diperlukan dalam Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
  - a. dokumen pelaksanaan anggaran;
  - b. sistem pengelolaan keuangan daerah;
  - c. sistem pengelolaan barang milik daerah;
  - d. data selain huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - e. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara di lingkungan PIHAK KEDUA; dan
  - f. hasil pengawasan internal.

#### **Pasal 5**

##### **OBJEK PERJANJIAN**

Obyek perjanjian kerjasama ini adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pada Pemerintah Kota Singkawang Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

#### **Pasal 6**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan akses data dalam rangka pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dari PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada PIHAK PERTAMA
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari PIHAK KEDUA dan dipergunakan dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
- (4) PIHAK PERTAMA akan memberikan pengarahan dan bimbingan ketika proses instalasi agen konsolidator pada PIHAK KEDUA

*pi*

*f*

**Pasal 7**  
**PELAKSANA**

- (1) Pelaksana dari perjanjian kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** menunjuk **Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang**.
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian ini berpedoman pada Petunjuk Tekhnis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**PERSELISIHAN**

Perselisihan yang mungkin timbul dari Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada hari dan tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

*di*

*/.*

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, rangkap pertama dan rangkap kedua mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**ADI SUDIBYO**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**AWANG ISHAK**

Lampiran : Keputusan Bersama Kepala  
Perwakilan Provinsi Kalimantan  
Barat BPK RI dan Walikota  
Singkawang

Nomor : 01/KB/XIX.PNK/07/2013

---

134.5/06/DPPKA

Tanggal : 29 Juli 2013

**PETUNJUK TEKNIS  
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB  
KEUANGAN NEGARA**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

**2013**

*di*

*1*

## 1. Daftar Isi

Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Walikota Singkawang Nomor 01/KB/XIX.PNK/07/2013 dan Nomor 134.5/06/DPPKA

1. Daftar Isi.....	1
2. Pendahuluan .....	2
2.1. Latar Belakang .....	2
2.2. Maksud dan Tujuan .....	2
2.3. Dasar Pembentukan Juknis .....	3
2.4. Pelaksana Akses Data .....	3
3. Lingkup Petunjuk Teknis.....	3
4. Sistem Aplikasi Konsolidasi Data.....	3
4.1. Aplikasi Konsolidasi Data di BPK RI .....	3
4.2. Aplikasi Konsolidasi Data di Pemerintah Kota .....	4
5. Infrastruktur Akses Data.....	4
6. Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data.....	4
6.1. Spesifikasi Kebutuhan Data .....	4
6.2. Perubahan Kebutuhan Data .....	5
7. Penyediaan dan Pengiriman Data.....	5
7.1. Penyediaan Data .....	5
7.2. Pengiriman Data .....	5
7.3. Prosedur Koneksi Data.....	5
7.4. Manajemen Data .....	6
7.5. <i>Help Desk</i> dan Penanganan Masalah.....	7
7.6. Gangguan Sistem di Luar Kontrol.....	7
8. Penanganan Perselisihan.....	7
8.1. Identifikasi Masalah .....	8
8.2. Pembahasan masalah di tingkat operasional .....	8
8.3. Pembahasan masalah di tingkat pimpinan .....	8
9. Penutup.....	8
9.1. Perubahan Petunjuk Teknis .....	8
9.2. Pemantauan Petunjuk Teknis.....	8
10. LEMBAR PENGESAHAN .....	9
Daftar Istilah .....	10



## 2. Pendahuluan

### 2.1. Latar Belakang

Pada tanggal 16 Juni 2011 BPK RI yang diwakili oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Singkawang yang diwakili oleh Bupati Singkawang telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kota Singkawang Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Nota Kesepahaman itu bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses data Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut meliputi sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi, dan prosedur akses data yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, pada Pasal 7 dalam Nota Kesepahaman tersebut menyebutkan bahwa masing-masing pihak melakukan kegiatan antara lain menyusun rancangan makro sistem akses data pihak kedua (Pemerintah Kota Singkawang), menyiapkan dan mengadakan infrastruktur pendukung akses data Pemerintah Kota Singkawang, membangun aplikasi akses data Pemerintah Kota Singkawang, melakukan uji coba akses data Pemerintah Kota Singkawang secara *online*, menyusun tata cara dan keamanan sarana akses data Pemerintah Kota Singkawang, melakukan implementasi akses data Pemerintah Kota Singkawang, dan melakukan pengawasan. Lebih lanjut berdasar pada uraian pasal 10 dalam Nota Kesepahaman menyatakan dalam rangka melaksanakan kegiatan seperti yang disebutkan pada Pasal 7 maka masing-masing Pihak dapat membentuk Tim Kerja. Untuk mendukung proses kegiatan pada Pasal 7 dalam Nota Kesepahaman disebutkan bahwa masing-masing pihak dapat melakukan rapat koordinasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

### 2.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Petunjuk Teknis (Juknis) adalah sebagai panduan bagi para pelaksana BPK RI dan Pemerintah Kota Singkawang dalam melakukan pengelolaan sistem informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kota Singkawang .

Tujuan Juknis adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Menentukan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

### 2.3. Dasar Pembentukan Juknis

Nota Kesepahaman antara BPK RI dan Pemerintah Kota Singkawang Nomor 363/NK/X-XIII.2/6/2011 dan Nomor 134.5/015/DPPKA tanggal 16 Juni 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

### 2.4. Pelaksana Akses Data

Pelaksana akses data terdiri atas 2 (dua) pihak yaitu BPK RI dan Pemerintah Kota Singkawang

1. Unit pelaksana akses data pada BPK RI
  - 1) BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
  - 2) Biro Teknologi Informasi (Biro TI) atau Sub Bagian Umum pada Perwakilan BPK RI.
2. Unit pelaksana akses data pada Pemerintah Kota Singkawang
  - 1) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Singkawang ;
  - 2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan.

## 3. Lingkup Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan **Sistem Aplikasi Konsolidasi Data, Infrastruktur Akses Data, Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data, Penyediaan dan Pengiriman Data dan Penanganan Perselisihan.**

## 4. Sistem Aplikasi Konsolidasi Data

Sistem aplikasi konsolidasi data adalah sistem aplikasi yang berfungsi mengkonsolidasikan data Pemerintah Kota Singkawang ke pusat data BPK RI secara aman.

Sistem aplikasi konsolidasi data yang disediakan oleh BPK RI terdiri dari modul master agen konsolidator dan modul agen konsolidator.

### 4.1. Aplikasi Konsolidasi Data di BPK RI

Aplikasi Konsolidasi data yang ada di BPK RI adalah modul master agen konsolidator yang berfungsi untuk menerima dan memproses data dari modul agen konsolidator di Pemerintah Kota Singkawang

#### 4.2. Aplikasi Konsolidasi Data di Pemerintah Kota Singkawang

Aplikasi konsolidasi data yang ada di Pemerintah Kota Singkawang adalah modul agen konsolidator yang berfungsi untuk mengakses, memproses dan mengirimkan data yang disediakan oleh Pemerintah Kota Singkawang secara periodik maupun non periodik ke Pusat Data BPK.

### 5. Infrastruktur Akses Data

Komunikasi data antara Pemerintah Kota Singkawang dan BPK RI menggunakan jaringan publik (internet) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

Modul master agen konsolidator diinstal pada Server yang di BPK, sedangkan modul agen konsolidator diinstal pada PC atau Server yang disediakan oleh Pemerintah Kota Singkawang dengan *platform* Microsoft Sql Server 2005 32 bit.

Modul agen konsolidator akan mengakses data yang disediakan oleh Pemerintah Kota Singkawang secara otomatis dan akan berkomunikasi secara langsung dengan modul master agen konsolidator melalui jaringan publik (*internet*) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

### 6. Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data

Juknis ini mengatur mengenai kebutuhan data atau informasi dan perubahan data atau informasi yang disediakan Pemerintah Kota Singkawang untuk memenuhi kebutuhan BPK RI dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara baik Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

#### 6.1. Spesifikasi Kebutuhan Data

Data atau informasi yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Singkawang untuk diakses dan dikirim melalui modul agen konsolidator ke Pusat Data BPK RI dalam memenuhi kebutuhan analisis minimal sebagai berikut:

- a. Data terkait dengan Laporan Keuangan;
- b. Data terkait dengan Saldo per akun dalam laporan keuangan yang juga mencakup akun/sub akun;
- c. Data terkait dengan Laporan Arus Kas;
- d. Data terkait dengan Laporan Perubahan Modal;
- e. Detil transaksi per akun (*Display GL Line Items*);
- f. Data terkait dengan Penganggaran;
- g. Data terkait dengan Penatausahaan Keuangan;
- h. Data terkait dengan Akuntansi dan Pelaporan;
- i. Data terkait dengan Kepegawaian dan Pembayaran Gaji;
- j. Data terkait dengan Barang dan Aset;
- k. Data terkait dengan Pendapatan dan Belanja;
- l. Data terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa;
- m. Data elektronik selain diatas yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- n. Peraturan Perundang-undangan;
- o. Hasil Pengawas Internal;
- p. Data *softcopy* rekening kas daerah dan kas di bendahara.

## 6.2. Perubahan Kebutuhan Data

Dalam hal terdapat kebutuhan data yang belum didefinisikan, BPK RI akan mengkomunikasikan kebutuhan data tersebut kepada Pihak Pemerintah Kota Singkawang yang ditunjuk sebagai *counterpart* BPK RI.

## 7. Penyediaan dan Pengiriman Data

### 7.1. Penyediaan Data

BPK RI melakukan identifikasi data atau informasi yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dari masing-masing Satuan Kerja pemilik data di Pemerintah Kota Singkawang Satuan kerja pemilik data di Pemerintah Kota Singkawang menyiapkan data beserta kamus data dan struktur data. Hasil kesepakatan data BPK RI beserta unit kerja pemilik data di Pemerintah Kota Singkawang dapat dijadikan sebagai masukan pada aplikasi e-Audit BPK RI.

### 7.2. Pengiriman Data

Pengiriman data dibagi menjadi dua kategori yaitu pengiriman data secara periodik dan pengiriman data secara non periodik.

#### 1. Penyediaan dan Pengiriman Data Secara Periodik

Pemerintah Kota Singkawang menyediakan data yang dibutuhkan dan telah disepakati sebelumnya dengan BPK RI kemudian mengirimkan data tersebut tiap bulan sekali paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya melalui modul agen konsolidator. BPK RI dapat mengakses data tersebut dalam periode yang sama.

#### 2. Penyediaan dan Pengiriman Data secara Non-Periodik

BPK RI dapat meminta kepada Pemerintah Kota Singkawang untuk disediakan data yang dapat diakses serta dikirim ke Pusat Data BPK melalui modul agen konsolidator di luar waktu yang disebutkan pada butir 7.2. angka 1, melalui cara:

- a. Penyampaian surat tugas pemeriksaan; atau
- b. Penyampaian surat permintaan dan/atau pemberitahuan tertulis.

### 7.3. Prosedur Koneksi Data

Prosedur koneksi database dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Prosedur koneksi database dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan *database* operasional Pemerintah Kota Singkawang dengan hak akses *read only*; (opsi 1)

- 2) Prosedur koneksi *database* dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan data hasil ekstrak dari *database* operasional Pemerintah Kota Singkawang dengan hak akses *read only*. (opsi 3)

#### 7.4. Manajemen Data

##### 1. Penyimpanan Data

Hasil konsolidasi data melalui aplikasi konsolidasi data disimpan pada Pusat Data BPK RI.

##### 2. Pemanfaatan Data

- a. Pemeriksa menggunakan data Pemerintah Kota Singkawang yang ada di Pusat Data BPK RI dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Dalam hal terdapat permintaan khusus untuk mengakses data Pemerintah Kota Singkawang yang ada di Pusat Data BPK RI dari unit kerja di luar Auditorat Utama Keuangan Negara VI, maka permintaan tersebut dapat dipenuhi setelah mendapatkan persetujuan Tortama Keuangan Negara VI.

##### 3. Validitas Data

- a. Data yang dikirimkan dari Pemerintah Kota Singkawang ke BPK RI adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Jika data yang diperoleh dianggap tidak sesuai, tidak lengkap dan/atau tidak valid berdasarkan verifikasi BPK RI maka Ketua Tim Pemeriksa akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Walikota Singkawang cq Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait untuk menyediakan dan/atau melengkapi data-data yang dibutuhkan.
- c. Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BPK RI, Walikota Singkawang cq Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait akan menginformasikan kepada *data owner* untuk menyediakan dan/atau melengkapi data-data yang dibutuhkan.
- d. Berdasarkan pemberitahuan dari Walikota Singkawang cq Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait, *data owner* akan menyediakan dan/atau melengkapi sesuai pemberitahuan tersebut.

##### 4. Kerahasiaan Data

Data yang diakses dan dikirim oleh modul agen konsolidator di Pemerintah Kota Singkawang ke Pusat Data BPK RI hanya digunakan untuk tugas pemeriksaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa "Setiap Pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

*Mi*

*f*

Selain itu, pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa "Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang membocorkan informasi yang diperolehnya dari *auditee*."

## 5. Keamanan Data

- a. Selama proses konsolidasi data melalui komunikasi modul agen konsolidator dan modul master agen konsolidator, data terjaga oleh sistem enkripsi yang disediakan oleh BPK RI.
- b. Pengamanan data pada masing-masing *server*, diatur melalui pedoman internal BPK RI dan Pemerintah Kota Singkawang.

### 7.5. *Help Desk* dan Penanganan Masalah

Jika Pemeriksa BPK RI atau Personil di Pemerintah Kota Singkawang mengalami permasalahan dalam proses konsolidasi data, maka dapat melaporkan ke layanan *Helpdesk* yaitu:

- a. Layanan *helpdesk* untuk BPK RI tersedia melalui Telepon 021-25549000 ext 2525/2526 atau email [eaudit@bpk.go.id](mailto:eaudit@bpk.go.id).
- b. Layanan *helpdesk* untuk Pemerintah Kota Singkawang tersedia melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Singkawang Telepon 0813.5227.4009 (CP: Yonizar) dan email: [pembukuan\\_singkawang@yahoo.co.id](mailto:pembukuan_singkawang@yahoo.co.id)

### 7.6. Gangguan Sistem di Luar Kontrol

Apabila terjadi gangguan sistem di luar kontrol BPK RI dan Pemerintah Kota Singkawang yang mengakibatkan terganggunya proses akses data, maka BPK RI dan Pemerintah Kota Singkawang mengupayakan solusi alternatif sehingga data yang dibutuhkan BPK RI tetap dapat diperoleh.

## 8. Penanganan Perselisihan

Dalam Pasal 9 Nota Kesepahaman dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Singkawang menjamin bahwa data Pemerintah Kota Singkawang yang disediakan melalui Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kota Singkawang merupakan data yang lengkap sesuai permintaan BPK RI dan sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam Sistem Informasi Pemerintah Kota Singkawang. Di lain pihak, BPK RI menjamin bahwa Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kota Singkawang digunakan hanya untuk kepentingan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Meskipun hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara tegas dan kedua belah pihak memiliki itikad dan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saja terjadi ketidaksesuaian data dengan kebutuhan atau penyalahgunaan data. Hal itu dapat mengakibatkan masing-masing pihak saling melempar kesalahan atau tanggung jawab kepada pihak lainnya yang berujung pada perselisihan.

Dalam hal terjadi demikian maka, Pasal 13 Nota Kesepahaman menyatakan bahwa perselisihan yang mungkin timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka perlu diatur hal-hal sebagai berikut:

#### 8.1. Identifikasi Masalah

Apabila salah satu pihak beranggapan bahwa permasalahan yang timbul dapat mengarah pada perselisihan, maka pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lainnya. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal melalui telepon atau *e-mail*. Berdasarkan pemberitahuan tersebut maka kedua belah pihak melakukan identifikasi masalah.

#### 8.2. Pembahasan masalah di tingkat operasional

Setelah masalah yang terjadi diidentifikasi oleh masing-masing pihak, maka kedua belah pihak melakukan pembahasan pada tingkat operasional. Pembahasan tingkat operasional ini dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Sub Bagian Umum pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Singkawang.

#### 8.3. Pembahasan masalah di tingkat pimpinan

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat operasional maka permasalahan tersebut oleh masing-masing pihak dilaporkan ke tingkat pimpinan masing-masing untuk diselesaikan.

## 9. Penutup

#### 9.1. Perubahan Petunjuk Teknis

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara BPK RI dan Pemerintah Kota Singkawang dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) Keputusan Bersama antara BPK RI dan Pemerintah Kota Singkawang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Juknis ini.

#### 9.2. Pemantauan Petunjuk Teknis

Juknis ini merupakan dokumen yang dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan dan/atau kondisi lain. Oleh karena itu, pemantauan atas Juknis ini dilakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk berdasarkan Pasal 10 Nota Kesepahaman antara Setjen BPK RI dan Pemerintah Kota Singkawang tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.





## Daftar Istilah

1. Biro Teknologi Informasi (Biro TI) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Setjen BPK RI sebagai alat Setjen BPK RI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi di Lingkungan BPK RI.
2. *Read Only* adalah kewenangan hak akses yang hanya bisa membaca sumber data tanpa bisa mengubah.
3. Non Periodik adalah waktu diluar periode yang sudah ditentukan.
4. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK RI.
5. Pemeriksaan Keuangan adalah Pemeriksaan atas laporan keuangan.
6. Pemeriksaan Kinerja adalah Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas Pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta Pemeriksaan aspek efektivitas.
7. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah Pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan atas laporan keuangan dan Pemeriksaan kinerja.
8. Pusat Data BPK RI adalah pusat pengumpulan dan pengelolaan data yang berisi data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur.

*ji*

*f*



## 10. LEMBAR PENGESAHAN

Juknis ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 29 Juli 2013 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



ADI SUDIBYO *AS*

PIHAK KEDUA, *4*



AWANG ISHAK *AI*